

## **Keterlibatan Warga Negara (*Civic Engagement*) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan**

**Setiawan Gusmadi**

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia  
gusmadi\_setiawan@gmail.com

### **Abstract**

*This paper aims to explore deeply about civic engagement in strengthening environmental cares. Civic engagement refers to the way citizens participate in the life of a community to improve the condition of others or to help shape the future of society. The writing of this paper is supported by literature studies and relevant research journals in the form of national journals and international journals. Civic engagement is expected to strengthen the character of environmental care clean, healthy, comfortable, and cultured environment. Movement to improve the environment of a more effective society must be supported in terms of education that develops responsible, creative and knowledgeable society. Civic engagement becomes important to contribute in a community that moves to manage, preserve and preserve the environment such as the development strategy of the Mangrove Center Foundation.*

**Keywords;** *Civic Engagement, Character Caring Environment.*

---

*Received: 20-05-2018; accepted: 18-06-2018; published: 30-06-2018*

*Citation: Setiawan Gusmadi, 'Menyingkap Keterlibatan Warga Negara (*Civil Engagement*) dalam Penguatan Karakter Peduli Lingkungan', *Mawa'izh*, vol. 9, no. 1 (2018), pp. 105-117.*

---

## A. Pendahuluan

**M**anusia terus-menerus memperoleh manfaat dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan. Lingkungan pada dasarnya telah digunakan untuk memperluas habitat dan memperbaiki kualitas hidup manusia yang saling mendukung untuk berkumpul dengan spesies lain. Masalah lingkungan tidak dapat dipahami tanpa kontribusi substansial oleh ilmu sosial, karena pendekatan sosial sangat diperlukan untuk menerapkan pelestarian lingkungan kebijakan di masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan lingkungan menyebabkan kerusakan lingkungan. Keterlibatan warga negara dalam *community civic* sebagai pemecahan masalah lingkungan melalui pelatihan yang dilakukan aktivis lingkungan. *Civic Engagement* merupakan salah satu konsep utama dalam *community civic* yang menekankan pada keterlibatan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan.<sup>1</sup>

Lingkungan kewarganegaraan tidak akan muncul secara spontan, mereka harus diciptakan secara kolektif. Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat dan menjamin penggunaan sumber daya secara optimal dengan mengurangi atau tidak merusak alam dan lingkungan. Setiap warga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>2</sup> Masalah pencemaran dan kelestarian lingkungan juga merupakan persoalan dalam ruang lingkup nasional. Hal ini disebabkan karena menyangkut keberhasilan pembangunan nasional, khususnya keberhasilan dalam jangka panjang, agar kesejahteraan yang lebih baik dapat juga dinikmati oleh generasi mendatang.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>3</sup> Praktiknya, teknologi sangat memerhatikan

---

<sup>1</sup> Syaifullah, *Pemberdayaan Generasi Muda Sebagai Dasar Filosofis Dari Keterlibatan Warganegara (Civic Engagement): Tinjauan Tentang Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)*, dalam "Penguatan Komitmen Komunitas Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn", (Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, April 2015), p. 103.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), p. 39.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.

kepentingan menyeluruh antara manusia dengan keselamatan alam dan lingkungan. Pengembangan teknologi tepat guna dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial-ekonomi masyarakat dan menjamin penggunaan sumber daya secara optimal dengan mengurangi atau tidak merusak alam dan lingkungan.

Pendidikan lingkungan tidak hanya digunakan dalam arti sempit pengajaran atau pembelajaran di sekolah formal atau universitas.<sup>4</sup> Perubahan perilaku pro-lingkungan: yang dianggap sebagai tujuan jelas dari pendidikan lingkungan. Hasil penelitian Syahri memandang bahwa kegiatan partisipasi warga negara dalam pelatihan bagi masyarakat dapat digerakkan dengan penguatan organisasi-organisasi relawan pecinta lingkungan hidup. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada nilai yang terkandung dalam Pancasila untuk lingkungan yang bersih, menjaga lingkungan hidup dengan fasilitas yang modern. Partisipasi tersebut dengan pembekalan dimensi pengetahuan, keterampilan dan nilai karakter peduli lingkungan sehingga tercapainya kepekaan melindungan lingkungan hidup. Pengertian yang lebih luas dalam mendidik masyarakat dan terutama kaum muda dengan melalui media, keluarga, tempat ibadah tentang pentingnya lingkungan.<sup>5</sup>

Manusia berkarakter memiliki kepedulian terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Peduli lingkungan menjadi penting dalam tumbuh kembangnya manusia.<sup>6</sup> Proses belajar sosial yang panjang dilakukan oleh masyarakat mempunyai sistem yang dibangun sesuai dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial yang baik. Penguatan pendidikan karakter peduli lingkungan sangat diperlukan dalam pendidikan nonformal. pendidikan karakter melalui organisasi yang ada di masyarakat ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Chris Hilson, 'Republican Ecological Citizenship in the 2015 Papal Encyclical On the Environment and Climate Change'. Jurnal *Critical review of international social and political philosophy* (2017), pp. 1-13.

<sup>5</sup> M Syahri, Bentuk-Bentuk Partisipasi Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Konsep Green Moral di Kabupaten Blitar" (2013), pp. 119-134. ,

<sup>6</sup> Naim, *Character Buiding Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*, (Jakarta: ArRuss Media, 2012), p. 200.

<sup>7</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Pemecahan masalah tersebut menjadi tanggung jawab semua kalangan masyarakat yang berkelompok dan individu sedangkan pemerintah sebagai perantara untuk pelestarian lingkungan hidup. Kualitas kesadaran manusia tidak terpisahkan dari lingkungan yang mempunyai tingkat kualitas keseimbangan lingkungan hidup.

Lingkungan kewarganegaraan melibatkan pemberdayaan orang untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengidentifikasi nilai dan tujuan mereka sehubungan dengan lingkungan dan bertindak sesuai, berdasarkan pengetahuan terbaik tentang pilihan dan konsekuensi.<sup>8</sup> Keterlibatan warga negara dalam kegiatan komunitas pecinta lingkungan secara kritis harus memahami masalah yang dihadapi masyarakat. Kelestarian alam menjadi tanggung jawab bersama dalam perubahan. Dengan organisasi komunitas peduli lingkungan diharapkan mampu menguatkan pemahaman masyarakat perilaku karakter peduli lingkungan yang bertanggung jawab. Tulisan ini berfokus pada beberapa permasalahan yang meliputi 1) karakter peduli lingkungan; 2) keterlibatan warga negara dalam ekologi kewarganegaraan (*ecological Citizenship*).

## **B. Karakter Peduli Lingkungan**

Melalui pendidikan menjadi salah satu menumbuhkan kesadaran warga negara akan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Pengetahuan timbul dalam lingkungan sehat positif dan negatif akan berdampak pada tindakan yang dilakukan warga negara. Pembentukan karakter dan moralitas warga negara tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan seseorang. Karakter dapat ditafsirkan dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan tindakan atau pola berfikir masyarakat. Maka penting rasanya untuk mengambil langkah yang dimaknai sebagai nilai-nilai tingkah laku atau tindakan manusia berkenaan dengan Tuhan, diri sendiri, dan

---

<sup>8</sup> Berkowitz, A.R., Ford, M.E. & Brewer, C.A. 'A Framework for Integrating Ecological Literacy, Civics Literacy and Environmental Citizenship in Environmental Education' in E.A. Johnson & M.J. Mappin (Eds.), *Environmental Education and Advocacy: Perspectives of Ecology and Education* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), p. 227.

lingkungan.<sup>9</sup> Peduli tidak hanya kepada orang lain saja tapi juga peduli akan lingkungan sekitar. Samani. dkk, menegaskan bahwa.

Karakter peduli digambarkan bahwa peduli adalah memperlakukan orang lain dengan sopan, bertindak santun, toleran terhadap perbedaan, tidak suka menyakiti orang lain, mau mendengar orang lain, mau berbagi, tidak merendahkan orang lain, tidak mengambil keuntungan dari orang lain, mampu bekerja sama, mau terlibat dalam kegiatan masyarakat, menyayangi manusia dan makhluk lain, setia, cinta damai dalam menghadapi persoalan.<sup>10</sup>

Adapun nilai-nilai dalam pendidikan karakter yang menerapkan nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam Perpres No 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter meliputi nilai (1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6) Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa ingin tahu, (10) Semangat kebangsaan, (11) Cinta tanah air, (12) Menghargai prestasi, (13) Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta damai, (15) Gemar membaca, (16) Peduli lingkungan, (17) Peduli sosial dan (18) Tanggung jawab.<sup>11</sup> Nilai karakter peduli lingkungan berupa sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitarnya, selain itu mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Peduli lingkungan dalam pendidikan kewarganegaraan terletak pada aspek karakter, yakni karakter peduli lingkungan yang mencegah kerusakan pada lingkungan alam disekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.<sup>12</sup> Untuk menumbuhkan karakter tersebut kita dapat mengadopsi konsep karakter baik dari yang dimulai dari mengenalkannya tentang kebaikan serta kewajiban warga negara terhadap lingkungannya (*moral knowing*), kemudian memberikan contoh-contoh perilaku, atau dampak-dampak mengenai

---

<sup>9</sup> Samani, M., & Hariyanto, *Konsep dan model pendidikan karakter*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), pp. 41-2.

<sup>10</sup> Samani, dkk., *Konsep dan Model Pendidikan Karakter* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), p. 51.

<sup>11</sup> Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

<sup>12</sup> Dewi Gunawati, 'Meranap Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Konfigurasi Pendidikan Kewarganegaraan', *PKn progresif*, vol. 7, no. 2 (2012), pp. 140-51.

masalah negara dengan lingkungan agar masyarakat menginginkan kebaikan dari menjaga lingkungan (*moral feeling*), dan memberikan kesempatan untuk dapat melakukan suatu tindakan menjaga lingkungan (*moral action*) sebagai bentuk kewajiban warga negara dengan lingkungan disekitarnya.<sup>13</sup>

### C. Keterlibatan Warga Negara dalam Kepedulian Lingkungan (*ecological Citizenship*)

Keterlibatan warga negara dalam kehidupan sosial menjadi harapan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat. *Civic Engagement* salah satu konsep utama dalam *Community Civics* untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan publik. Jacoby & Associates mengemukakan bahwa *civic engagement encompasses actions wherein individuals participate in activities of personal and public concern that are both individually life enriching and socially beneficial to the community*.<sup>14</sup> Pendapat tersebut menjelaskan keterlibatan warga negara mencakup tindakan dimana individu berpartisipasi dalam kegiatan kepedulian pribadi dan publik yang secara individual saling memperkaya dan bermanfaat secara sosial bagi masyarakat.

Keterlibatan warga negara telah didefinisikan sebagai proses mempercayai bahwa seseorang dapat dan harus membuat perbedaan dalam meningkatkan komunitasnya. Untuk meningkatkan masyarakat, seseorang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai yang dibutuhkan untuk membuat perbedaan. Kepemilikan dan demonstrasi pengetahuan, keterampilan, dan nilai tersebut diungkapkan melalui sikap dan perilaku.<sup>15</sup>

Keterlibatan warga negara menekankan partisipasi dalam pelayanan sukarela kepada masyarakat setempat, baik oleh individu yang bertindak secara independen atau sebagai peserta dalam sebuah kelompok. Keterlibatan warga negara dapat didefinisikan sebagai cara dimana individu, melalui tindakan kolektif, mempengaruhi masyarakat sipil yang lebih besar.<sup>16</sup> Kewarganegaraan ekologis

---

<sup>13</sup> Thomas Lickona, *Educating for Character* (New York: Bantam Books, 1991), p. 51.

<sup>14</sup> Barbara Jacoby and Associates, *Civic Engagement in Higher Education: Concepts and Practices*, (United States: Jossey-Bass A Wiley Imprint, 2009), p. 97.

<sup>15</sup> Amy Doolittle & Anna C. Faul, 'Civic Engagement Scale: A Validation Study', *SAGE Open*, (2013), pp. 1-7.

<sup>16</sup> Richard P. Adler & Judy Goggin, 'What Do We Mean By "Civic Engagement"?', *Journal of Transformative Education*, vol. 3, no. 3 (2005), p. 238.

menyajikan sebuah catatan normatif tentang bagaimana warga negara harus menjalankan kehidupan mereka, mengurangi dampak lingkungan mereka. Tindakan yang dilakukan masyarakat menunjukkan perubahan perilaku dengan hasil negosiasi yang kompleks antara standar hidup, pengetahuan tentang penyebab dan kontribusi terhadap perubahan iklim.<sup>17</sup> Praktek kewarganegaraan ekologis melibatkan tindakan individu sebagai pemilih, konsumen, menyangkut implikasi kekuatan dan keadilan dari gaya hidup barat daya yang intensif.

Setiap warga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. *Environmental citizenship involves empowering people to have the knowledge, skills, and attitudes needed to identify their values and goals with respect to the environment and to act accordingly, based on the best knowledge of choices and consequences.*<sup>18</sup> Pendapat tersebut menjelaskan kewarganegaraan lingkungan melibatkan pemberdayaan orang untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengidentifikasi nilai dan tujuan mereka sehubungan dengan lingkungan dan bertindak sesuai, berdasarkan pengetahuan terbaik tentang pilihan dan konsekuensi.

Dalam setiap kasus, ada kelemahan tentang perubahan perilaku masyarakat yang cepat, sementara lingkungan kewarganegaraan inisiatif bisa memakan waktu lebih lama.<sup>19</sup> Kendala yang tampaknya masalah berarti pada gerakan bersih lingkungan, menangan kembali pohon yang diterapkan pada peraturan perundang-undangan. Lingkungan kewarganegaraan adalah tentang mengakui hak-hak lingkungan dalam dibatasi wilayah politik.

Kewarganegaraan ekologi telah disarankan sebagai pendorong perilaku pro-lingkungan individu, memberikan fondasi yang lebih stabil untuk perubahan gaya hidup daripada mengandalkan alat kebijakan eksternal.<sup>20</sup> Relevansi Ekologi kewarganegaraan untuk menjelaskan program pro-lingkungan diuji yang dirancang

---

<sup>17</sup> Johanna Wolf, Katrina Brown & Declan Conway, 'Ecological Citizenship and Climate Change: Perceptions and Practice', *Environmental Politics*, vol. 18, no. 4, (2009), pp. 503-21.

<sup>18</sup> Berkowitz, A.R., Ford, M.E. & Brewer, C.A., 'A Framework for Integrating Ecological Literacy', p. 227.

<sup>19</sup> Andrew Dobson, 'Environmental Citizenship: Towards Sustainable Development', *Sustainable Development*, vol. 15 (2007), pp. 276-85.

<sup>20</sup> Sverker C. Jagers, Johan Martinsson & Simon Matti, 'Ecological Citizenship: A Driver of Pro-environmental Behaviour?', *Environmental Politics*, vol. 23, vol. 3 (2013), pp. 434-53.

untuk menangkap berbagai aspek. Ekologi warga terikat pada wilayah negara dan dipraktekkan dalam pendidikan lingkungan secara eksklusif di masyarakat.

Kewarganegaraan ekologis melibatkan beberapa batasan hak dan tanggung jawab moral manusia dan alam. Secara eksplisit menggambarkan bagaimana kesadaran akan konsekuensi lingkungan mengarah pada kepercayaan normatif pribadi yang mengharuskan orang untuk kemudian terlibat dalam perilaku pro-lingkungan. Wawasan pendidikan lingkungan sangat penting untuk diimplikasikan dalam rangka memperluas pembelajaran *citizenship* dari lokal menuju global. Salah satu tantangan *environmental* kurang dihargai yang sekarang kita hadapi adalah kombinasi ketidakpedulian dan apatis antara warga dalam menghadapi iklim global perubahan dan penurunan keanekaragaman hayati. Memperluas konsep kewarganegaraan menjadi kebutuhan pengalaman belajar warga dilakukan secara komprehensif evaluasi yang akan memberikan wawasan yang berguna bagi pendidik lingkungan hidup dan masa depan.<sup>21</sup>

Dapat dipahami bahwa individu yang berpikir sepanjang garis ekologi kewarganegaraan untuk berperilaku ramah lingkungan dalam aktivitas warga negara. Aspek ekologi kewarganegaraan tertentu lebih penting bagi perilaku pro-lingkungan daripada yang lain. Kewarganegaraan ekologis telah disarankan sebagai pendorong perilaku pro-lingkungan individu, memberikan fondasi yang lebih stabil untuk perubahan gaya hidup daripada mengandalkan alat kebijakan eksternal.

Skala *New Ecological Paradigm* (NEP) digunakan untuk mengukur sikap dan kesiapan berperilaku peduli lingkungan. Skala paradigma ekologis baru mencakup pandangan yang lebih lengkap dan terperinci dalam mengukur sikap kepedulian lingkungan. NEP hasil revisi memaksimalkan nilai validitas konten yang dimiliki dan terbukti konsisten sebagai alat ukur. Skala paradigma ekologis baru mengidentifikasi 5 dimensi ekologi meliputi dimensi *balance of nature, limit to growth, anti anthropocentrism, anti-exemptionalism dan eco-crisis*.<sup>22</sup> Lima dimensi ekologi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

---

<sup>21</sup> Jennifer Rebecca Kelly & Troy D. Abel, 'Fostering Ecological Citizenship: The Case of Environmental Service-Learning in Costa Rica', *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, vol. 6, no. 2 (2012).

<sup>22</sup> Dunlap, R. E., et al, 'Measuring Endorsement of The New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale', *Journal of Social Issues*, vol. 56, no. 3 (2000), pp. 425-42.

Tabel 1. Item Sarana dan Standar Deviasi untuk Skala Paradigma Ekologis Baru

No	Paradigma Ekologis Baru (NEP)	
1	<i>Balance of nature</i> (Keseimbangan alam)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bila manusia mengganggu alam, seringkali menimbulkan konsekuensi bencana.</li> <li>– Keseimbangan alam cukup kuat untuk mengatasi dampak negara industri modern.</li> <li>– Keseimbangan alam sangat halus dan mudah kesal.</li> </ul>
2	<i>Eco-crisis</i> (Ekokrisis)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Manusia sangat menyalahgunakan lingkungan.</li> <li>– Apa yang disebut "krisis ekologis" yang dihadapi umat manusia telah dibesar-besarkan.</li> <li>– Jika semuanya berlanjut pada kursus mereka sekarang, kita akan segera mengalami bencana ekologis yang besar.</li> </ul>
3	<i>Anti-exemptionalism</i> Anti ekspesialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kecerdikan manusia akan memastikan bahwa kita tidak membuat bumi tidak dapat dipercaya.</li> <li>– Terlepas dari kemampuan kita, manusia masih tunduk pada hukum alam.</li> <li>– Manusia pada akhirnya akan cukup belajar tentang bagaimana alam bekerja untuk bisa mengendalikannya.</li> </ul>
4	<i>Limits to growth</i> Batas pertumbuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kita mendekati batas jumlah orang yang bisa didukung bumi.</li> <li>– Bumi seperti pesawat ruang angkasa dengan ruang dan sumber yang sangat terbatas.</li> <li>– Bumi memiliki banyak sumber daya alam jika kita hanya belajar mengembangkannya.</li> </ul>
5	<i>Anti-anthropocentrism</i> (dominasi manusia)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Manusia memiliki hak untuk memodifikasi lingkungan alam agar sesuai dengan kebutuhan mereka.</li> <li>– Tanaman dan hewan memiliki hak sebanyak manusia untuk eksis.</li> <li>– Manusia dimaksudkan untuk menguasai seluruh alam.</li> </ul>

Kelima dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dimensi *balance of nature* mengukur keyakinan bahwa keseimbangan alam sangat rentan. Alam rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia. Dimensi *limit to growth* mengukur keyakinan bahwa sumber daya yang ada di bumi memiliki keterbatasan. Dimensi *anti-anthropocentrism* mengukur keyakinan bahwa manusia memiliki hak untuk mengubah dan menguasai lingkungan alam. Dimensi *anti-exemptionalism* mengukur keyakinan bahwa kehidupan manusia tidak terbebas dari aturan alam/hukum alam. Dimensi *eco-crisis* mengukur keyakinan bahwa manusia menyebabkan

kerusakan yang merugikan bagi lingkungan fisik, contohnya perubahan iklim. Dimensi *eco-crisis* melihat pandangan individu mengenai krisis ekologi dan kerusakan alam yang terjadi akibat aktivitas manusia.

Kewarganegaraan sebagai tujuan utama pendidikan lingkungan. Lima komponen tumpang tindih dari kewarganegaraan lingkungan meliputi sebagai berikut. 1) *Ecological Literacy*: memahami sistem ekologis utama dengan menggunakan pemikiran ekologis yang baik, sekaligus memahami sifat ilmu ekologi dan hubungannya dengan masyarakat. 2) *Civics Literacy*: memahami sistem sosial, ekonomi, budaya, dan politik kunci dengan menggunakan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan. 3) *Values Awareness*: kesadaran akan nilai-nilai pribadi berkenaan dengan lingkungan, dan kemampuan untuk menghubungkan nilai-nilai ini dengan pengetahuan dan kebijaksanaan praktis untuk membuat keputusan dan tindakan. 4) *Self-efficacy*: memiliki kemampuan untuk belajar dan bertindak berkenaan dengan nilai dan kepentingan pribadi di lingkungan. 5) *Practical Wisdom*: memiliki kebijaksanaan praktis dan keterampilan untuk pengambilan keputusan dan bertindak berkenaan dengan lingkungan.<sup>23</sup>

Salah satu penelitian berbasis masyarakat tentang strategi pengembangan *ecological citizenship* Yayasan Mangrove Center Tuban. Keterlibatan warga negara dapat diwujudkan dengan kesadaran bersama dalam sekolah peduli lingkungan. Hasil penelitian tersebut meliputi 1) strategi pelaksanaan program kerja kepada para anggota dan masyarakat yang meliputi program konservasi dan pembibitan, program pemberdayaan *ecogreen* dan program pembinaan sekolah peduli lingkungan; 2) terjalinnya hubungan baik antara manusia dan alam melalui kegiatan konservasi, masyarakat memiliki kepedulian serta kesadaran terhadap hak dan kewajibannya dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan kegiatan penanaman pohon, bersih-bersih pantai, perawatan terhadap tanaman, perawatan terhadap mata air, tidak mengambil pasir pantai untuk kepentingan pribadi serta selalu menjaga kebersihan lingkungan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Berkowitz, A.R., Ford, M.E. & Brewer, C.A. 'A Framework for Integrating Ecological Literacy, p. 230.

<sup>24</sup> Ida Nurmayanti & Harmanto, 'Strategi Yayasan Mangrove Center Tuban dalam Mengembangkan *Ecological Citizenship* pada Masyarakat Tuban', *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 2 (2017), pp. 83-97.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui keberhasilan memberdayakan masyarakat dalam memperbaiki kerusakan lingkungan. Kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan diwujudkan dengan keterlibatan masyarakat dalam program *mangrove center*. Berlangsungnya pendidikan dalam masyarakat dilakukan oleh organisasi komunitas pecinta lingkungan yang memberi kontribusi memberdayakan masyarakat berkelanjutan. Gerakan memperbaiki lingkungan hidup masyarakat yang lebih efektif haruslah didukung dari segi pendidikan yang mengembangkan masyarakat bertanggung jawab, kreatif dan berilmu. Pendekatan pendidikan kemasyarakatan adalah salah satu pendekatan yang melihat masyarakat sebagai agen dan objek sekaligus. Dalam proses ini, para pemimpin masyarakat perlu menempatkan diri sebagai fasilitator yang mendorong perubahan menuju ke arah yang lebih baik

#### **D. Penutup**

Keterlibatan warga negara diharapkan mampu menguatkan karakter peduli lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan berbudaya lingkungan. Gerakan memperbaiki lingkungan hidup masyarakat yang lebih efektif haruslah didukung dari segi pendidikan yang mengembangkan masyarakat bertanggung jawab, kreatif dan berilmu. Keterlibatan warga negara menjadi penting untuk berkontribusi dalam komunitas yang bergerak mengelola, menjaga dan melestarikan lingkungan seperti strategi pengembangan Yayasan *Mangrove Center*.

Kepedulian lingkungan diharapkan relawan atau aktifis lingkungan terkait kepedulian lingkungan di kalangan masyarakat adalah terciptanya rasa peduli lingkungan, memiliki sikap kritis, bisa menjadi inspirasi untuk membangun gerakan-gerakan kepedulian lingkungan melalui sikap dan perbuatan. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan akibat tingginya integritas pendidikan di sekolah, pendidikan dalam keluarga dan pendidikan dalam masyarakat. keterlibatan warga negara menekankan partisipasi dalam pelayanan sukarela kepada masyarakat setempat, baik oleh individu yang bertindak secara independen atau sebagai peserta dalam sebuah kelompok.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Berkowitz, A. R., Ford, M. E. & Brewer, C. A. 'A Framework for Integrating Ecological Literacy, Civics Literacy and Environmental Citizenship in Environmental Education', in E.A. Johnson & M. J. Mappin (Eds.), *Environmental Education and Advocacy: Perspectives of Ecology and Education*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Dobson, Andrew, 'Environmental citizenship: Towards sustainable Development', *Sustainable Development*, vol. 15 (2007). pp. 276-85.
- Doolittle, Amy & Anna C. Faul, 'Civic Engagement Scale: A Validation Study', *SAGE Open*, (2013), pp. 1-7.
- Dunlap, R. E., et al., 'Measuring Endorsement of The New Ecological Paradigm: A Revised NEP Scale', *Journal of Social Issues*, vol. 56, no. 3 (2000), pp. 425-42.
- Gunawati, Dewi, 'Meranap Pembelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Konfigurasi Pendidikan Kewarganegaraan', *PKn progresif*, vol. 7, no. 2, (2012), pp. 140-51.
- Hilson, Chris. 'Republican Ecological Citizenship in the 2015 Papal Encyclical On the Environment and Climate Change', *Critical review of international social and political philosophy*, (2017), pp. 1-13.
- Jacoby, Barbara & Associates. *Civic Engagement in Higher Education: Concepts and Practices*. United States: Jossey-Bass A Wiley Imprint, 2009.
- Johanna Wolf, Katrina Brown & Declan Conway, "Ecological Citizenship and Climate Change: Perceptions and Practice", *Journal Environmental Politics*, vol. 18, no. 4 (2009), pp. 503-21.
- Kelly, Jennifer Rebecca & Abel, Troy D, 'Fostering Ecological Citizenship: The Case of Environmental Service-Learning in Costa Rica', *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, vol. 6, no. 2 (2012).
- Lickona, Thomas. *Educating for Character*. New York: Bantam Books. 1991.
- Naim, N. *Charakter Buiding Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*. Jakarta: ArRuss Media, 2012.
- Nurmayanti, Ida & Harmanto. Strategi Yayasan Mangrove Center Tuban dalam Mengembangkan *Ecological Citizenship* pada Masyarakat Tuban. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 2 (2017), pp. 83-97.
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter
- Richard P. Adler & Judy Goggin, 'What Do We Mean By "Civic Engagement"?', *Journal of Transformative Education*, vol. 3, no. 3 (2005), p. 238.
- Samani, M., dkk. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Samani, M., & Hariyanto. *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

Sverker C. Jagers, Johan Martinsson & Simon Matti, 'Ecological citizenship: A Driver of Pro-Environmental Behaviour?', *Environmental Politics*, vol. 23, no. 3 (2013), pp. 434-53.

Syahri, M. 'Bentuk-Bentuk Partisipasi Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Konsep Green Moral di Kabupaten Blitar', (2013), pp. 119-34.

Syaifullah, 'Pemberdayaan Generasi Muda Sebagai Dasar Filosofis Dari Keterlibatan Warganegara (Civic Engagement) : Tinjauan Tentang Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)', in *Penguatan Komitmen Komunitas Akademik dalam Memperkokoh Jatidiri PKn*, Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia, 2015.